

Sistem Pemerataan Guru Nasional (SPGN) Sebagai Sistem Penyebaran Guru Untuk Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Daerah 3T

Atika Puji Rahmawati

Universitas Islam Sultan Agung
atikal493@gmail.com

Article History

received 20/9/2021

revised 20/10/2021

accepted 20/11/2021

Abstract

In 1966 Indonesia sent teachers to Malaysia to improve education in the country (Malaysia), in this case, it is certain that education in Indonesia is more advanced than education in Malaysia. But in reality, Malaysia is far more advanced. It is known that education in Indonesia is still low, especially in the 3T (Front, Outermost and Disadvantaged) areas. This is certainly inseparable from various factors that affect the low quality of education and cause educational inequality. Educational problems in the 3T area are very complex, one of which is the problem of educators or teachers. Such as, lack of many teachers, lack of competence, qualifications that are below quality standards, and an unbalanced distribution.

Keywords: 3T area, inequality, even distribution

Abstrak

Pada tahun 1968 Indonesia mengirim guru ke Malaysia untuk memperbaiki pendidikan dalam negeri (Malaysia), dalam hal ini sudah pasti pendidikan di Indonesia lebih maju daripada pendidikan di Malaysia. Namun pada kenyataannya, Malaysia jauh lebih maju. Diketahui bersama bahwasanya pendidikan di Indonesia masih rendah khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Hal ini tentu tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan serta menimbulkan ketimpangan pendidikan. Permasalahan pendidikan di daerah 3T sangat kompleks, salah satunya adalah permasalahan pendidik atau guru. Seperti, kurangnya jumlah pengajar, minimnya kompetensi, kualifikasi yang berada di bawah standar mutu, serta distribusi yang tidak merata.

Kata kunci: daerah 3T, ketimpangan, pemerataan



PENDAHULUAN

Untuk menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju harus didukung dengan sumber daya manusia yang unggul secara kualitas. Dengan cita-cita mulia "... Mencerdaskan kehidupan bangsa ..." (Pembukaan UUD 1945, alinea 4) perlu memperhatikan salah satu faktor dalam mencerdaskan, yaitu guru. Negara harus menjamin pendidikan untuk setiap warganya, hal ini termaktub dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu." Kenyataannya kualitas pendidikan tidak merata di beberapa daerah dalam wilayah negara Indonesia, hal ini menyebabkan pendidikan Indonesia lebih rendah daripada negara lain.

Hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) yang diterbitkan pada Maret 2019, Indonesia menduduki urutan ke-74 dari 79 negara angka yang sangat memprihatinkan, sementara Malaysia yang notabenehnya pernah meminta tim pengajar ditahun 1969 menduduki urutan ke-39, hal ini menurut penulis sangat memalukan faktor utamanya kualitas pendidikan Indonesia lebih rendah.

Sudah 76 tahun Indonesia merdeka, masih masuk dalam kategori negara berkembang. Padahal Indonesia terkenal kaya akan tenaga kerja, namun naasnya kualitas pendidikan masih sangat rendah. Banyak tenaga kerja Indonesia hanya menjadi buruh kasar sampai pembantu rumah tangga, hal ini sangat memprihatinkan karena sangat berhubungan dengan pendidikan. Negara dengan sumber daya manusia ini belum mampu bersaing dengan negara yang lain melalui jalur pendidikan. (Suprayogo, 2014:16)

Menurut anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), penyebab rendahnya kualitas pendidikan Indonesia masih terdapat disparitas layanan pendidikan antar daerah di Indonesia, khususnya antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Hal ini ditandai dengan adanya daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) mencakup 122 Kabupaten/Kota (Kemendikbud).

Permasalahan pendidikan di daerah 3T umumnya sulit dijangkau dikarenakan berhadapan dengan semua keterbatasan yang ada, diantaranya kurangnya jumlah pengajar atau guru, minimnya kompetensi, kualifikasi guru yang berada di bawah standar mutu serta distribusi guru yang tidak merata. Permasalahan pada pendidikan di daerah 3T yang berkelanjutan dapat menimbulkan ketimpangan yang sangat besar dengan pendidikan yang ada di daerah perkotaan. Serta dapat meningkatkan popularitas arus urbanisasi dari desa ke perkotaan guna mendapatkan pendidikan yang lebih baik. (Rigantara, 2016)

Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (2005) memaparkan bahwa yang dapat mempengaruhi suatu daerah dikatakan tertinggal dapat dilihat dari perspektif sarana dan prasarana, apabila suatu daerah memiliki keterbatasan pada sarana dan prasarannya, dapat dipastikan daerah tersebut akan mengalami kesenjangan atau kesulitan dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas ekonomi maupun sosialnya. Sulitnya menjangkau akses sarana dan prasana pada suatu daerah akan menjadi pertimbangan bagi guru yang mengajar di daerah tersebut. Kendati demikian, setiap warga negara Indonesia mendapatkan hak yang sama untuk pendidikan yang bermutu sebagaimana yang termaktub dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan begituehingga pemerintah wajib untuk melaksanakan pemerataan di bidang pendidikan di seluruh wilayah Indoneia.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) setiap tahunnya mengeluarkan formasi CPNS, di tahun 2021 formasi CPNS untuk guru PPPK sebanyak 1.002.616. Sementara jumlah guru di Indonesia menurut data Dapodik Kemendikbud sebanyak 3.207.995. Kendati demikian, seperti yang sudah dipaparkan bahwa pendidikan di

Indonesia belum merata. Sejak awal terbentuknya Indonesia, pembangunan nasional serta pendidikannya hanya berpusat di daerah Jawa. Sementara daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) terutama Indonesia bagian timur masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan dengan layak. Hal ini sungguh miris untuk warga negara Indonesia. Untuk itu perluasan serta pemerataan akses pendidikan di daerah 3T menjadi fokus bersama untuk mencari solusi agar ketimpangan dapat segera teratasi. Maka dari itu artikel ini dibuat untuk memberikan pandangan sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk pemerataan pendidikan, dalam hal ini pemerataan persebaran guru yang memenuhi kualifikasi guru. Pemerataan persebaran guru sebagai salah satu strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di Indonesia.

Dari kondisi umum yang sudah dipaparkan, maka dapat diambil rumusan masalahnya adalah sebagai berikut, (1) Bagaimana sistem pendidikan di Indonesia? (2) Faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di daerah 3T? (3) Bagaimana penerapan sistem pendidikan dalam hal ini pemerataan guru di daerah 3T? Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui ketimpangan pendidikan di daerah 3T serta penerapan sistem pendidikan khususnya pemerataan guru daerah 3T.

METODE

Menurut Sugiyono (2007:1) metode penelitian kualitatif yang menjadi instrumen kunci adalah peneliti itu sendiri hal yang digunakan penelitian untuk teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan dan menganalisis data yang bersifat induktif dan lebih menekankan makna dibanding generalisasi pada objek yang alamiah. Membuat deskripsi adalah Tujuan dari penelitian deskriptif, hubungan antar fenomena yang diselidiki melalui gambar atau lukisan dengan sistematis, faktual dan akurat dengan sifat-sifat menentukan fakta-fakta.

Dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Dengan narasumber penelitian adalah beberapa masyarakat yang terlibat dalam proses pendidikan di wilayah 3T khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara dengan latar belakang yang berbeda.

Narasumber yang pertama adalah Jubirman. Dengan latar belakang sebagai alumni Universitas Islam Sultan Agung Semarang (asal Kab. Konawe Kepulauan) dan guru SMPN 4 Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan. Untuk narasumber kedua adalah Jabal Nur. Dengan latar belakangnya sebagai mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan berasal dari Kabupaten Bombana, dengan kondisi geografis rumah yang berhadapan dengan SDN 120 Tahite dan sering mengamati permasalahan pendidikan di daerah tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber, serta kajian dokumen. Sumber data yang diperoleh dalam penulisan ini yaitu data utama, diperoleh dari narasumber secara langsung maupun melalui perantara media telepon. Sementara untuk data tambahan diperoleh dengan kajian dokumentasi dari jurnal, buku, dan referensi pendukung lainnya. Kajian dokumentasi diperlukan memperdalam pemahaman masalah yang akan diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil data survey yang dikeluarkan oleh Programme for International Student Assessment (PISA) ditahun 2018 posisi Indonesia menduduki nomor 74 dari 78 negara. Penilaian dilakukan melalui pengumpulan data atau kuesioner yang targetnya adalah murid dan kepala sekolah. Untuk mengumpulkan data atau informasi tentang latar belakang, respon murid terhadap proses pembelajaran, maupun dilingkungan sekitar. Hasil dari kuesioner yang disimpulkan menemukan faktor penyebab indonesia menduduki posisi 4 terbawah. Tiga hasil utama penilaian PISA: (1) profil batas bawah

ketermapilan dan pengetahuan murid sebsagai Indikator-indikator dasar. (2) beragam variabel demografi berkaitan dengan keterampilan yang dimiliki murid, sosial ekonomi, dan pendidikan, serta hasil pencapaian tingkat pendidikan dan kesejahteraan. (3) dimulai dengan keikutsertaan negara untuk ke tujuh kalinya dalam tes PISA, yang menunjukkan perubahan dalam nilai tengah hasil tes PISA, dalam variasi hasil di antara murid, dan dalam hubungan antara hasil dengan berbagai variabel khusus murid, sekolah, dan sistem. (Laporan Nasional PISA 2018 Indonesia)

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU No. 20 Tahun 2003).

Yang harus diperhatikan adanya 4 masalah utama untuk diprioritaskan penanganannya terhadap pendidikan nasional (Ujiyanti, Tatak Prapti; 2009). Secara umum terdapat beberapa faktor atau permasalahan yang mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan Indonesia, yaitu ekuitas untuk mendapatkan akses pendidikan, kualitas pendidikan yang masih rendah, masalah-masalah lain berhubungan dengan pendidikan, efektifitas dalam sistem manajemen pendidikan (Yuliani, 2016)

Bagaimana sistem pendidikan Indonesia?

Pengelolaan sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab menteri, yang ada dalam konstitusi, Sistem Pendidikan Nasional UU RI No 20 Tahun 2003. Dalam sistem pendidikan nasional terdapat beberapa aspek diantaranya yaitu aspek masyarakat, sarana-prasarana, lingkungan serta sumberdaya. Dimana aspek-aspek tersebut memiliki keterkaitan dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Wajah sistem pendidikan di Indonesia dikelola secara sentralistik, yang artinya berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia. Komponen dalam pembelajaran yang berupa tujuan pendidikan, materi ajar, metode pembelajaran, bahan ajar, warga sekolah-guru, karyawan serta murid- di sekolah, persyaratan penerimaannya, jenjang kenaikan pangkat, bahkan hingga penilaiannya diatur oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk semua sekolah di seluruh pelosok tanah air.

Dalam pengendalian dan pengelolaan sistem pendidikan nasional dilakukan oleh pemerintah. UU Sitem Pendidikan Nasional, masyarakat adalah mitra pemerintah dalam menjalankan pendidikan, tetapi kenyataannya semua hal ditentukan oleh pemerintah. Sudah seharusnya pemerintah membuat sistem distribusi guru secara merata tanpa mengecualikan daerah 3T. Diketahui bersama Kemdikbud mengeluarkan statistik jumlah daerah 3T sebanyak 122 kabupaten/kota, andil pemerintah dipertanyakan karena masalah tersebut.

BKN (Badan Kepegawaian Nasional) setiap tahun mengeluarkan formasi CPNS untuk guru. Pada tahun 2021 mengeluarkan formasi CPNS untuk guru PPPK sebanyak 1.002.616. Sementara jumlah guru di Indonesia menurut data Dapodik Kemendikbud sebanyak 3.207.995. Dibandingkan dengan jumlah Tentara Nasional Indonesia sebanyak 1.080.000 personil, tetapi jumlah yang lebih sedikit ini bisa merata di seluruh penjuru Indonesia. Maka dari itu dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pendidikan, baik yang diadakan oleh masyarakat dan atau pemerintah, dalam hal pembinaan dan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan adalah tanggung jawab pemerintah.

Faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di daerah 3T?

Seperti yang sudah dipaparkan, adanya permasalahan dalam pendidikan di Indonesia yang menyebabkan ketimpangan pendidikan di Indonesia, dengan masalah

kondisi sosial dan wilayah di Indonesia dengan luas wilayah 1,9JT kilometer yang terbagi dari berbagai pulau dengan jumlah lebih dari 17 ribu pulau menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara sistem pendidikan di Indonesia. (United Nations, 2017a; BPS, 2017). Dimana terdapat kurang lebih 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia (Indonesia.go.id, 2019) dan 652 bahasa daerah (Kemdikbud, 2018).

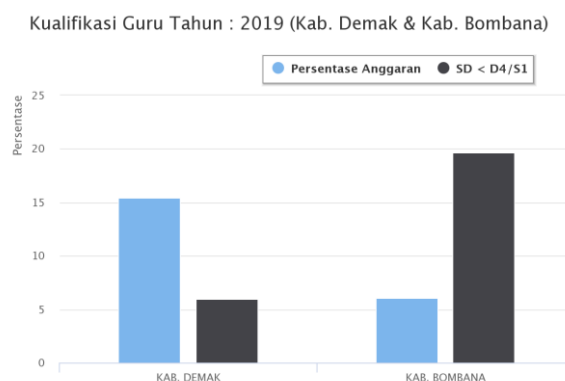
Di Indonesia terdapat 122 kabupaten/kota yang termasuk ke dalam daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). (Yuliani, 2016) Masalah utama pendidikan di daerah 3T:

1. Kurangnya jumlah pengajar dan minimnya kompetensi

Untuk mencapai suatu pendidikan yang lebih maju, maka guru yang profesional dibutuhkan. Setiap guru diwajibkan memiliki kemampuan dalam memahami materi, bahan ajar secara luas dan mendalam. Di daerah 3T kekurangan tenaga pendidik atau pengajar yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan.

2. Kualifikasi yang di bawah standar mutu

Di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara rata-rata tenaga pengajar hanya memiliki jenjang pendidikan sebatas tamatan SMA. Sebagai contoh pada SDN 120 Tahiite, Bombana. Guru yang PNS hanya 2 dari guru yang mengajar disana. (Nur, J. 2021, 9) Adapun di Kabupaten Konawe Kepulauan, selain guru yang mengajar hanya tamatan SMA terdapat guru yang sarjana, hanya saja bukan sarjana pendidikan. Sarjana ekonomi mengajar sebagai guru SD. Dengan begitu kualifikasi tenaga pendidik di daerah 3T di bawah standar mutu. (Jubirman, 2021) Berikut perbandingan kualifikasi guru Kabupaten Demak tidak termasuk daerah 3T dengan Kabupaten Bombana yang termasuk dalam daerah 3T.



Gambar 1. Neraca Pendidikan Daerah Kemdikbud 2019

3. Distribusi yang tidak merata.

Pendistribusian guru yang tidak merata menjadi salah satu penghambat kemajuan pendidikan di Indonesia. Distribusi guru berkaitan dengan kebijakan pemerintah, pengelolaan sistem informasi kependidikan serta pengawasan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek yang memungkinkan terjadinya kekurangan guru di suatu daerah. Distribusi yang tidak merata akan menyebabkan ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Sistem Pemerataan Guru Nasional (SPGN)

Sistem Pemerataan Guru Nasional (SPGN) adalah sistem yang mengatur formasi guru dalam CPNS dengan tujuan pemerataan tenaga pengajar di Indonesia. Sistem ini dirancang agar dapat dilakukan pembenahan maksimal terhadap sistem

pendidikan dari hulu ke hilir. Adapun sistematika dalam pelaksanaan SPGN adalah sebagai berikut.

1. Menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat pengabdian yang kuat kepada calon guru sejak mereka mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan. Guru atau ASS sebagai aparatur sipir negara harus memahami dengan baik fungsi pelayanan dan pengabdian mereka kepada negara. Sehingga calon guru atau ASN siap ditempatkan dimanapun untuk mengabdikan kepada negara.
2. Menempatkan guru di daerah minimal 2 tahun. Setiap guru yang telah lolos CPNS akan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia selama minimal 2 tahun mengabdikan, setelahnya guru diperbolehkan untuk tetap tinggal atau kembali ke daerah masing-masing.
3. Diberikan akses yang lebih besar untuk melanjutkan Pendidikan. Setelah selesai masa wajib pengabdian, guru diberikan akses pendidikan yang lebih besar untuk melanjutkan jenjang pendidikannya (beasiswa). Dengan begitu tidak hanya sebagai motivasi tetapi juga dapat memperbaiki kualitas guru.
4. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Seorang guru yang diberi tugas ke daerah diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum agar merasa aman dari segala macam ancaman dan gangguan di daerah tugasnya. Sebagai contoh, seorang guru di SMAN 1 Torjun yang bernama Ahmad Budi Cahyono meninggal diduga karena tindak kekerasan dari seorang murid ketika jam pelajaran berlangsung. Tidak lama kemudian disusul berita kekerasan yang dilakukan oleh orang tua murid di SMP 4 Lolak, Sulawesi Utara karena tidak terima dengan hukuman menandatangani sebuah pernyataan yang diberikan kepada anaknya. (Jendela Pendidikan, 2021) Maka dari itu, perlu adanya kepastian dan perlindungan hukum yang jelas untuk masing-masing guru yang ditugaskan.
5. Memberikan tunjangan yang memadai. Memberikan tunjangan yang memadai sebagai bentuk apresiasi negara terhadap guru dan dalam upaya mensejahterakan tenaga pengajar di Indonesia. Hal ini bertujuan agar profesi guru menjadi pekerjaan profesional. Salah satu penyebab turunnya kualitas guru disebabkan oleh aktivitas lain guru selain mengajar yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-harinya, seperti berdagang, bertani, beternak, dan lain-lain yang membuat fokus seorang guru terhadap profesi utamanya terbagi. Seorang guru bisa menjadi tenaga profesional ketika kebutuhan dasarnya sebagai guru terpenuhi.
6. Memberikan kontrak yang jelas. Memberikan kontrak yang jelas adalah upaya untuk mengetahui sejauh mana pemerintah menjamin keamanan, kesejahteraan, kualitas pengajar. Dimana dalam kontrak tersebut sudah mencakup beberapa poin penting di atas.

Dengan adanya Sistem Pemerataan Guru Nasional (SPGN) diharapkan tidak ada lagi daerah yang kekurangan guru serta daerah dengan kualitas pendidikan yang rendah. SPGN diharapkan mampu untuk meningkatkan mutu pendidikan dan dapat mengatasi ketimpangan pendidikan antar daerah di Indonesia.

SIMPULAN

Kualitas Pendidikan Indonesia masih rendah dikarenakan beberapa faktor, diantaranya 1) Masalah pemerataan kesempatan dan akses pendidikan; 2) Masalah peningkatan mutu; 3) Masalah relevansi pendidikan; 4) Masalah efisiensi dan sistem manajemen pendidikan. Dalam hal ini mengakibatkan adanya ketimpangan pendidikan. Di Indonesia terdapat daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), dimana pada daerah 3T terdapat berbagai permasalahan dalam pendidikan, seperti (1)

Kurangnya jumlah pengajar; (2) Minimnya kompetensi; (3) Kualifikasi yang berada di bawah standar mutu; (4) Distribusi yang tidak merata.

Persebaran guru yang tidak merata, merupakan masalah yang tidak bisa dianggap sepele. Banyak sekolah yang kekurangan guru, sehingga proses belajar mengajar tidak berjalan dengan baik. Kualifikasi guru yang di bawah standar mutu dapat mempengaruhi mutu atau kualitas pendidikan murid, karena seorang guru seharusnya memenuhi standar kualifikasi seperti yang termaktub dalam UU SISDIKNAS pasal 42 ayat 1 dan ayat 2.

1. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

Penulis merumuskan Sistem Pemerataan Guru Nasional (SPGN) sebagai wujud inovasi dan pembaruan dalam sistem pemerataan guru agar tercapainya pemerataan guru yang maksimal, memperbaiki pendidikan di Indonesia, serta mengatasi ketimpangan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jubirman. (2021, 9 9). Kondisi Guru di Kabupaten Konawe Kepulauan. (A. P. Rahmawati, Interviewer)
- Kemendikbud. (2018, Juli). Badan Bahasa Petakan 652 Bahasa Daerah di Indonesia. Retrieved from Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/badan-bahasa-petakan-652-bahasa-daerah-di-indonesia>
- Kemendikbud. (2019). Laporan Nasional PISA 2018. Retrieved from Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang: <http://repositori.kemdikbud.go.id/16742/1/Laporan%20Nasional%20PISA%202018%20Indonesia.pdf>
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Kriteria Daerah Khusus Dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru" (Kemendikbud, 2012).
- Nur, J. (2021, 9 9). Pandangan Pendidikan di SDN 120 Tahite. (A. P. Rahmawati, Interviewer)
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suprayogo, P. I. (2014). Menghidupkan Jiwa Ilmu. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ujiyanti, T. P. (2009). Reformasi Pendidikan Dasar di Indonesia. The Indonesian Institute, Police Assesment .
- Yuliani. (2016). Pendidikan Di Indonesia Dalam Human Development Index (HDI). Jurnal Rontal Keilmuan PPKn Volume 2/No. 2
- Roshonah, A. F., Sutihat, & Alam, A. 2020. Penerapan Model *Blended Learning* Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Di SDN Pisangan 01. *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 1–10.
- Sahara, R., Sofya, R. 2020. Pengaruh Penerapan Model *Flipped Learning* Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Ecogen*, 3(3): 419-431.
- Sari, I. K. 2021. *Blended Learning* sebagai Alternatif Model Pembelajaran Inovatif di Masa *Post-Pandemi* di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(4): 2156-21632. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1137>

- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suprihatiningrum, J. 2013. *Strategi Pembelajaran Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: AR-RUZZ Media.
- Suprijono, A. 2010. *Cooperative Learning*. Yogyakarta. Pustaka Media.
- Trianto. 2010. *Model Pembelajaran Terpadu, Konsep, Strategi dan Implementasinya dalam KTSP*. Jakarta: Bumi Aksara.
- UU No. 20 Tahun 2003.
- Widyaningsih, O., Yudha, C.B., & Nugraheny, D. C. 2019. Pengembangan Model *Blended Learning* Untuk Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(2).